

KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN HUBUNGAN DENGAN SiLPA DI KABUPATEN BUNGO

H. Izudin, Syaparudin dan Syamsuddin H.M.

Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi

Abstract. Budget Revenues and Expenditures should be managed properly and correctly, noted that financial management shall indicator of the success of the viewable area if the area of financial performance have been implemented effectively and efficiently, the impact of the effectiveness and efficiency of lead remaining in Over Budget Calculation known pleased with SiLPA, for the author want to know the district noted that financial performance is connected dengan Bunge Silpa with the aim of (1) determine the relationship of SiLPA Revenue Bungo Regency period 2001-2010 (2) to determine the relationship Silpa-forming component with the period 2001-2010 SiLPA Bungo district, (3) to determine effectiveness and efficiency of financial management Bungo district in 2001-2010, and (4) to determine whether the effectiveness and efficiency affects the Silpa. Data analysis methods used in this study is the analysis of secondary data from Government Financial Statements consisting of Bungo District Budget Realization report, Balance Sheet, Statement of Cash Flow from Revenue Management Agency Regional Finance and Asset District Bungo years 2001-2010 and data derived from the Regional Planning Board Bungo District. By using the formula analysis korelasi and regression Karl Person's and the analysis of the ratio obtained (1) The relationship of income of Regional against SiLPA is in the category of very low, low and medium, (2) The relationship components of SiLPA with SiLPA is in the category of moderate, strong and very strong, (3) The effectiveness of financial management are in the category of effective and very effective., for efficiency is in the category are not efficient, less efficient and reasonably efficient (4) Effect of the effectiveness of 1.419 means SiLPA event of excess revenue will mempengaruhi SiLPA increased by 1.42 percent and the efficiency of minus 0.389 SiLPA mean if there is a reduction / savings will affect the increase in spending of 0.39 percent SiLPA.

Keywords: SiLPA, Budget, Financial Management

PENDAHULUAN

Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, pemerintah pusat mengantisipasi dengan dikeluarkannya paket kebijakan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan peran dari lembaga pemerintah daerah adalah bagi pelayanan publik (*public services*) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah.

Hal ini tentunya akan menuntut peran baru eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan dan anggaran daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dari segi ini peran eksekutif dan legislatif serta masyarakat akan semakin besar, guna menjamin terciptanya pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum,

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di mana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui

kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan dan sisi belanja, sedangkan dari sisi anggaran belanja langsung merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Perkembangan APBD terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi daerah.

Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Elemen manajemen keuangan daerah diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi ; (1) akuntabilitas ; (2) *value for money*; (3) kejujuran dalam mengelola keuangan publik; (4) transparansi; (5) pengendalian.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di samping itu, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala

prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Dalam mendukung peningkatan pelayanan prima harus didukung pula dengan pembiayaan terhadap aparat, di mana harus didukung pula dengan penerimaan khususnya penerimaan asli daerah. Salah satu aspek penting dalam otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan keuangannya sendiri, untuk itu setiap daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Disamping dana bagi hasil pajak dan bukan pajak juga menjadi sumber pendanaan yang harus mendapat perhatian khusus karena dana tersebut berasal dari potensi-potensi yang berasal dari daerah.

Dilihat dari penerimaan asli daerah kabupaten Bungo periode 2001-2010 mengalami peningkatan, rata-rata penerimaan PAD kabupaten Bungo periode 2001-2010 adalah 29,82 milyar, PAD tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp. 64,57 milyar penyumbang terbesar dari peningkatan PAD ini bersumber dari sektor pertambangan. Jika dilihat dari tingkat kemandirian daerah selama periode 2001 – 2010 rata-rata 8,95 persen, angka kemandirian diatas 10 persen terjadi pada tahun 2002 sebesar 10,11 persen, tahun 2003 sebesar 13,43 persen, dan tahun 2008 sebesar 11,91 persen.

Kemandirian terendah selama periode 2001 – 2010 terjadi pada tahun 2010 sebesar 3,44 persen. Rata-rata dana bagi hasil dan bukan pajak adalah 42,16 milyar, dilihat dari trend terjadi peningkatan dari tahun ke tahun angka terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu 105,99 milyar ini disebabkan penerimaan royalti sektor pertambangan batubara yang terakumulasi dari tahun sebelumnya.

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyempurnaan manajemen keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dari pelaksanaan kegiatan dan program. Sistem penganggaran ini merupakan suatu sistem penyusunan anggaran yang menekankan kepada hasil dan pengendalian belanja, sistem ini mengkaitkan langsung antara keluaran (output) dengan hasil (outcome) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran yang dialokasikan. Penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja tersebut sangat berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Diawali dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapong Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rencana program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program untuk tahun kedepan yang pembahasannya dimulai bulan Juli sebelum tahun anggaran dan pada bulan Oktober Raparda APBD telah dibahas bersama eksekutif dengan legislatif, dengan demikian penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Dana Alokasi Khusus belum diketahui angkanya secara pasti kondisi ini berdampak terhadap kurangnya akuratnya perkiraan penerimaan yang menyebabkan tingginya angka SiLPA dari tahun ke tahun, ada kecenderungan persentase DAU terhadap pendapatan daerah dari tahun ke tahun cenderung menurun, tahun 2001 persentase DAU terhadap total pendapatan daerah 83,19 persen, persentase ini terus menurun hingga pada tahun 2010 persentase DAU terhadap pendapatan daerah menjadi 50,17 persen. Persentase DAK terhadap penerimaan daerah cenderung meningkat dari tahun ke

tahun, tahun 2001 persentase DAK terhadap penerimaan daerah 0,51 persen, persentase ini terus meningkat sehingga pada tahun 2010 persentase DAK terhadap penerimaan daerah menjadi 8,97 persen. DBH Pajak dan Bukan Pajak cenderung meningkat pada tahun 2001 persentase DBH Pajak dan Bukan Pajak terhadap penerimaan daerah 4,65 persen, persentase ini terus meningkat hingga tahun 2010 persentase DBH Pajak dan Bukan Pajak menjadi 17,05 persen demikian juga dengan lain-lain pendapatan yang sah cenderung meningkat, pada tahun 2001 persentase lain-lain pendapatan yang sah 3,40 persen dan pada tahun 2010 persentase lain-lain pendapatan yang sah menjadi 16,30 persen. Walaupun SiLPA tersebut merupakan salah satu dari sumber penerimaan pembiayaan namun secara hakiki SiLPA menunjukkan kurang cermatan dalam penganggaran baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran/kegiatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pendapatan daerah dan komponennya terhadap SiLPA Kabupaten Bungo periode tahun 2001 – 2010. hubungan komponen pembentukan SiLPA dengan SiLPA kabupaten Bungo periode 2001 – 2010. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bungo periode tahun 2001 - 2010 dan Untuk mengetahui apakah efektivitas dan efisiensi mempengaruhi SiLPA.

METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data primer periode 2001-2010 yang terdiri dari: Data laporan realisasi anggaran, data Neraca, data laporan arus kas kabupaten bungo,. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari : Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Bungo tahun 2001 – 2010 dan instansi-instansi yang terkait. Penelitian ini menggunakan dua teknik

analisis data yaitu Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui hubungan pendapatan daerah dan komponennya terhadap SiLPA kabupaten Bungo Periode 2001 – 2010 adalah Analisa Korelasi Karl Pearson's.

Untuk mengetahui hubungan komponen pembentuk SiLPA dengan SiLPA kabupaten Bungo periode 2001 - 2010

- Melihat komponen yang penebab penambahan SiLPA
 - a. dari sisi pendapatan adalah kelebihan pedapatan dari target pendapatan APBD
 - b. Dari sisi belanja adalah penghematan belanja dari target belanja
- Melihat komponen penyebab pengurangan SiLPA
 - a. Dari sisi pendapatan adalah dengan melihat kekurangan pendapatan dari target APBD
 - b. Dari sisi belanja adalah dengan melihat kelebihan belanja dari target belanja

Dengan melihat faktor-faktor penambahan dan pengurangan SiLPA maka Alat Analisa yang digunakan adalah *Analisa Korelasi Karl*

$$R = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} - \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

- Y =SiLPA
- X₁ =Kelebihan Pendapatan
- X₂ =Penghematan Belanja Tidak Langsung
- X₃ =Penghematan Belanja Langsung

Untuk menjelaskan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bungo periode 2001 – 2010 adalah analisa rasio yaitu :

Rumus Efektivitas :

$$Efv = \frac{\sum rpd}{\sum tpd} \times 100$$

- Efv = Efektivitas
- rpd = Realisasi Pendapatan Daerah
- tpd = Target Pendapatan Daerah

Rumus Efisiensi :

$$Efs = \frac{\sum t blj}{\sum pd}$$

- Efs = Efisiensi
- t blj = Total Belanja
- pd = Pendapatan Daerah

Metode Analisis Kuantitatif, analisis ini digunakan untuk melihat secara empiris sejauh mana pengaruh variabel bebas atau independent (X) terhadap variabel terikat atau independent (Y). Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 efs_1 + \beta_2 efv_2 + \mu$$

- Y = SiLPA
- β₀ = Konstanta
- efs₁ = Efisiensi Belanja
- efv₂ = Efektivitas Pendapatan
- μ = Error term

Variabel terikat (*dependent Variable*) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Y), sedangkan variabel bebas (*independent variable*) adalah Efisiensi (Efs) dan Efektivitas (Efv). Dengan demikian bentuk fungsinya adalah :

$$Y = f(Efs + Efv)$$

- Y = SiLPA
- Efs = Efisiensi
- Efv = Efektivitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Pendapatan Daerah dan Komponennya Terhadap SiLPA

Pendapatan Daerah adalah uang yang masuk kedalam kas daerah yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan dalam APBD, pendapatan daerah ini terdiri dari PAD, DBH Pajak dan

Bukan Pajak, DAU, DAK dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dilihat dari proporsi pendapatan daerah, proporsi tertinggi berasal dari DAU 62,35 persen, DBH Pajak dan Bukan Pajak 11,85 persen, Lain-lain Pendapat Yang Sah 10,41 persen, PAD 9,12 persen dan yang terendah adalah DAK 6,28 persen.

Hubungan Komponen Pembentuk SiLPA Dengan SiLPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan akibat dari kelebihan dari pendapatan daerah dan penghematan belanja dalam satu tahun anggaran. SiLPA yang terjadi di Kabupaten Bungo periode 2001 – 2010 disebabkan adanya kelebihan pendapatan daerah secara rata-rata. Rata-rata kelebihan dari PAD 2,428 milyar, rata-rata kelebihan DBH Pajak dan Bukan Pajak sebesar 8,193 milyar , rata-rata kelebihan DAU sebesar -0,04 milyar, rata-rata kelebihan DAK sebesar 74,29 milyar, dan rata-rata kelebihan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah sebesar 0,274 milyar dengan demikian maka dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terjadi rata-rata kelebihan pendapaan daerah sebesar 10,420 milyar

Disamping kelebihan pendapatan daerah diatas, SiLPA juga terjadi dikarenakan penghematan belanja, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terjadi rata-rata penghematan belanja tidak langsung sebesar 32,797 milyar dan rata-rata belanja langsung sebesar 26,773 milyar, ini berarti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terjadi rata-rata penghematan belanja sebesar 59,571 milyar. Dengan demikian dalam periode 2001 – 2010 terjadi pembentukan rata-rata SiLPA sebesar 69,991 milyar yang bersumber dari kelebihan pendapatan dan penghematan belanja.

Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Terhadap SiLPA Kabupaten Bungo

Efektivitas keuangan daerah berhubungan dengan pencapaian target

penerimaan, apabila target terpenuhi maka secara keuangan dapat dikatakan sangat efektif dan bila target yang ditetapkan tidak tercapai maka dapat dikatakan kurang atau tidak efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bungo periode 2001 – 2010 berada pada katagori efektif dan sangat efektif dengan tingkat persentase 98,75 sampai dengan 109,48. Disamping efektivitas, efisensi juga menentukan jumlah SiLPA tahun berkenaan semakin efisien maka sumbangan terhadap pembentukan SiLPA semakin besar pula, efiensi pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bungo periode 2001 2010 berada pada katagori cukup efisien, kuang efisien dan tidak efisien dengan tingkat persentase antara 80,47 sampai dengan 112,30

Dengan menggunakan pendekatan regresi berganda didapat hasil regresi sebagai berikut :

$$Y = -89,767 + 1,419 \text{ efv} - 0,389 \text{ efs} + \mu$$

Hasil Estimasi Regresi

Variabel	Nilai Koefisien Regresi	T stat	Signifikasi
1	2	3	4
Nilai Konstanta	-89,767	-1,763	0,121
Efektivitas	1,419	3,554	0,009
Efisiensi	-0,389	-2,276	0,057
Nilai F Hitung	16,138		
R ²	0,822		

Variabel tarkait (*Dependent Variable*) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (*Y*), sedangkan variable bebas (*Independent Variable*) adalah Efektivitas (*efv*) dan Efisiensi (*efs*) atau SiLPA merupakan fungsi dari efektivitas dan efisiensi

$$Y = f(\text{efv} + \text{efs})$$

Persamaan diatas menggambarkan walaupun tidak terjadi efektivitas dan efisiensi tetap terjadi penurunan SiLPA sebesar 89,76 persen dari realisasi SiLPA selama periode observasi (tahun 2001–

2010). koefisien regresi positif 1,419 menggambarkan bila terjadi efektivitas 1 persen akan mempengaruhi peningkatan SiLPA sebesar 1,419 persen demikian juga sebaliknya apabila terjadi tidak efektif 1 persen akan mengurangi SiLPA sebesar 1,419 persen . Koefisien regresi negatif 0,389 persen menggambarkan bila terjadi efisiensi 1 persen akan mempengaruhi peningkatan SiLPA sebesar 0,389 persen atau sebaliknya apabila terjadi tidak efisien 1 persen akan mengurangi SiLPA sebesar 0,389 persen

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Hubungan Pendapatan Daerah dan komponennya terhadap SiLPA periode 2001 – 2010 mempunyai hubungan positif dengan kriteria hubungan korelasi sangat rendah sampai dengan korelasi sedang yaitu korelasi antara 0,028 sampai dengan 0,518. Hubungan PAD dengan SiLPA berada pada kriteria korelasi rendah yaitu 0,398; Hubungan DBH Pajak dan Bukan Pajak dengan SiLPA berada pada kriteria sangat rendah yaitu 0,028; Hubungan DAU dengan SiLPA berada pada kriteria sedang yaitu 0,518 ; Hubungan DAK dengan SiLPA berada pada kriteria sangat rendah yaitu 0,196 ; Hubungan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan SiLPA berada pada kriteria sangat rendah yaitu 0,111 ; Hubungan total pendapatan daerah dengan SiLPA rendah yaitu 0,271.

Hubungan yang paling tinggi adalah hubungan SiLPA dengan DAU yaitu 0,518 dan yang terendah adalah SiLPA dengan DBH Pajak bukan pajak yaitu 0,028.

SiLPA yang terjadi disebabkan adanya kelebihan pendapatan, penghematan belanja tidak langsung dan penghematan belanja langsung. Hubungan komponen pembentukan SiLPA dengan SiLPA periode 2001 – 2010 dengan

menggunakan SPSS dapat diketahui sebagai berikut ; hubungan kelebihan/pengurangan pendapatan berada pada kriteria sangat kuat yaitu 0,936; hubungan penghematan belanja tidak langsung berada pada kriteria sangat kuat yaitu 0,899 ; hubungan Penghematan Belanja Langsung dengan SiLPA berada pada kriteria sedang yaitu 0,440 dan hubungan SiLPA dengan total penghematan dan kelebihan pendapatan berada pada kriteria kuat yaitu 0,764.

Analisa Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo Periode 2001 – 2010 untuk Efektivitas rata-rata 103,12 yaitu sangat Efektif. Untuk Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah rata-rata 95,95 yaitu kurang efisien. Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi terhadap SiLPA kabupaten Bungo periode 2001 – 2010 dengan menggunakan regresi berganda didapat hasil Efektivitas dan Efisiensi berpengaruh terhadap pembentukan SiLPA Koefisien regresi efektivitas 1,419 menyatakan bahwa bila terjadi pelampauan pendapatan daerah akan mempengaruhi penambahan SiLPA sebesar 1,419 persen. Dengan menggunakan uji secara parsial (Uji t) = 0.05 (5 persen) diperoleh t hitung untuk efektivitas 3,554. Oleh karena t hitung berada diluar dari t tabel (-2,262 s/d 2,262) maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara nyata terhadap pembentukan SiLPA.

Koefisien regresi -0,389 menyatakan bahwa apabila terjadi efisiensi belanja akan mempengaruhi SiLPA sebesar 0,389. dengan menggunakan uji parsial (Uji t) = 0.05 (5 persen) diperoleh t hitung untuk efisiensi - 2,276. Oleh karena t hitung berada diluar t tabel (-2,262 s/d 2,262,) maka efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara nyata terhadap pembentukan SiLPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. Moh, 1986, **Strategi Pengembangan Industri** ed. Hendra Esmara, Jakarta, LP3S, Jakarta.
- Arifin, A. S. M. 1997. **Dampak Pengembangan Kegiatan Industri Terhadap Pengembangan Perekonomian Pedesaan**, ITB, Bandung.
- Arsyad, Lincolin, 1997, **Ekonomi Pembangunan**, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Aziz, Iwan. J. 1994. **Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia**, Di edit oleh Marsudi Djojodipuro, LPFE-UI, Jakarta.
- Dombush dan Fisher, 1993. **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Edgar M.Hoover, 1975, **Regional Economics**, Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Firman, T. 1985. **Regional In equities dan Pengembangan Wilayah**, ITB Bandung.
- Friedman, I & W. Alonso. 1985. **Regional Development and Planning**, MIT Press Massachusset.
- Glasson, J. 1977. **Pengantar Perencanaan Regional** Terjemahan oleh Paul Sihotang. LPFE-UI, Jakarta.
- Habibi, 1986, **Pemikiran dan Arah Kebijakan Pembangunan Seminar Nasional**, Unpad, Bandung.
- Isard, W. 1960. **Methods of Regional Analysis an Introduction to Regional Science** MIT Press. Massachusset.
- Jhingan, M.L. 1990. **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**. Diterjemahkan oleh D. Guritno. Rajawali Press. Jakarta.
- _____ 1993. Edisi Keempat, **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**. Diterjemahkan oleh D. Guritno. Rajawali Press. Jakarta.
- Kadariah. 1985. **Ekonomi Perencanaan**, LPFE-UI, Jakarta.
- Kamaluddin, Rustian. 1987. **Pengantar Ekonomi Pembangunan dilengkapi dengan Analisis Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Nasional**. LPFE-UI, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, **Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**, Seminar Nasional, LP FE-UI, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, **Ekonomi Pembangunan**, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Mangkusobroto, Guritno, 1993, **Ekonomi Publik**, LP FE-UI, Jakarta.
- Musgrave dan Richard, A. 1989, **Keuangan Negara, Teori dan Praktek**, LP FE-UI, Jakarta.
- Richardson, H.W. 1991. **Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional**. Terjemahan Paul Sihotang, LPFE-UI, Jakarta.
- Sagir, Soeharsono, 1982, **Kerangka Kebijakan perluasan Kesempatan Kerja Dalam Dasa Warsa 1983-1993**, editor Hendra Esmara, LP FE UI, Jakarta.
- Sahara, 1999. **Analisis Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah. Khususnya Ibukota Jakarta**, IPB, Bogor.
- Soemitro Djoyohadikusumo, 1994, **Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan**, LP3ES, Jakarta.
- Soepono, P. 1993. **Analisis Shift Share Perkembangan dan Penerapan**. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI) No. I Tahun III.
- Soelistyo, 1986. **Ekonomi Makro, Analisa Pendapatan Nasional**, LP3ES, Jakarta.
- Sukirno, 2004, **Ekonomi Pembangunan**, Penerbit LP FE-UI, Jakarta.
- Syahroni, 1998. **Studi Identifikasi Sektor ekonomi Potensial Bagi Pengembangan Wilayah Jawa Barat**, Pasca Sarjana ITB, Bandung.
- Tarigan, R. 2000. **Analisa Wilayah untuk Perencanaan Draft ke IX**, Medan.

- Tjiptoherijanto, Priyono, 1989. **Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Todaro, M.P. 1997. **Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga edisi Keenam**. Alih Bahasa oleh Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- _____ 2003. Edisi 9, **Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga edisi Keenam**. Alih Bahasa oleh Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.